

SELEKSI PNS MELIBATKAN PT MENINGKATKAN CITRA PEMERINTAH

Oleh: A. Ridwan Siregar*

Kebijakan pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melibatkan perguruan tinggi (PT) dalam proses seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) telah terbukti mampu meningkatkan citra pemerintah baik pusat maupun daerah. Keterlibatan tersebut yang sudah dilakukan sejak tahun 2005, meliputi antara lain pembuatan dan penggandaan naskah soal ujian serta pemeriksaan dan penyusunan peringkat hasil ujian. Pemerintah provinsi, kabupaten atau kota menggunakan daftar peringkat hasil ujian yang dibuat oleh PT sebagai dasar untuk pengusulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah seluruh persyaratan lainnya dipenuhi oleh pelamar. Selanjutnya, BKN melakukan verifikasi terhadap berkas usulan yang diajukan oleh para kepala daerah diantaranya untuk memeriksa apakah calon yang diajukan telah sesuai dengan urutan prioritas dalam daftar peringkat hasil ujian yang dibuat oleh PT. Mekanisme proses seleksi seperti itu diatur dalam pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk mengetahui mengapa perlu melibatkan PT, berikut ini akan dicoba diidentifikasi beberapa alasannya.

Pengadaan PNS berkualitas

Walaupun belum pernah dilakukan survei tentang kualitas hasil seleksi PNS dalam empat tahun terakhir ini, tetapi banyak pihak yang mengakui bahwa PNS yang diterima memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa pengguna di suatu daerah yang ditanyai tentang hal ini ada yang mengatakan dengan singkat "memang hasilnya diakui jauh lebih baik dan tidak susah untuk mengajarnya". Hal ini terjadi karena proses seleksi dilakukan dengan murni dan transparan melalui suatu kompetisi yang ketat dimana suatu formasi jabatan di suatu daerah dilamar oleh puluhan hingga ratusan dan mungkin ribuan peserta. Proses seleksi dibuat dengan lebih menekankan pada potensi seseorang sebagai modal dasar untuk meningkatkan pengetahuan kelak setelah menjadi PNS. Selain itu, melalui proses seleksi yang benar-benar kompetitif dan berkeadilan juga akan diperoleh PNS yang bermoral baik. Seperti kata pepatah "jika kita menanam padi, yang tumbuh tidak hanya padi tetapi juga rumput, tetapi kalau kita menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi". Kalau kita mengharapkan PNS sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa kelak, prosesnya juga harus dimulai dari sesuatu yang bersih, tidak mengandalkan hubungan koneksitas dalam pengadaannya.

Meringankan beban pejabat

Meringankan beban psikologis para pejabat terutama di daerah merupakan salah satu alasan bekerjasama dengan PT. Sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, pada saat ada penerimaan PNS banyak sekali "permintaan tolong" datang kepada para pejabat baik langsung maupun melalui perantara dari berbagai pihak dan dengan beragam status sosial untuk membantu kelulusan seseorang dalam seleksi PNS. Hal ini tentu saja akan sangat merepotkan kepala daerah dan para pejabat bawahannya. Jika semua dipenuhi maka proses seleksi hanya akan merupakan kegiatan formalitas belaka karena ada kemungkinan semua formasi untuk suatu jenis jabatan hanya akan diisi dengan calon-calon dari kolega dan kerabat saja.

Dalam suatu kesempatan, penulis pernah mengemukakan kepada seorang pejabat daerah bagaimana kalau proses seleksi dilakukan sendiri di daerah tanpa melibatkan PT, ia mengatakan "wah, itu sama dengan menabuh genderang perang dengan sesama kolega kalau kita mau menerapkan *fairness* dalam proses seleksi". Dengan bekerjasama dengan PT, mereka tinggal mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan oleh PT, silahkan ditanyakan ke sana. Tentu saja masyarakat luas tidak dengan begitu saja percaya bahwa PT akan melakukannya dengan murni seratus persen. Oleh karena itu, banyak anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat dan wartawan di daerah baik perorangan maupun kelompok yang datang untuk menanyakan dan menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan naskah soal ujian dan pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh PT. Mereka biasanya diterima oleh pimpinan PT sebagai pembina atau penanggung jawab dalam kepanitian yang dibentuk oleh PT. Kunjungan seperti itu banyak dilakukan pada tahun pertama bekerjasama dengan PT dan belakangan oleh sejumlah daerah yang baru dimekarkan yang baru pertama sekali menyelenggarakan pengadaan PNS.

Memudahkan pengawasan dan pengendalian

Dengan memusatkan kegiatan pembuatan naskah soal dan pemeriksaan hasil ujian di suatu PT di suatu provinsi, akan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas baik dari tingkat pusat maupun daerah. Mereka cukup datang ke lokasi PT untuk memantau proses seleksi dan mengevaluasi apakah proses yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan terhindar dari kecurangan, dan bila perlu melakukan *site visit* secara acak ke lokasi ujian tertentu saja. Pengawasan di lokasi PT dapat dilakukan dengan memantau pendistribusian naskah soal ujian dan pengembalian lembar jawaban ujian (LJU) serta mengevaluasi hasil pemerinkatan. Untuk pendistribusian naskah soal ujian ke lokasi-lokasi ujian dan pengembalian LJU untuk diperiksa di suatu PT, biasanya melibatkan kepolisian setempat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan lebih terjamin keamanannya dari berbagai gangguan.

Meningkatkan moral peserta ujian

Sistem seleksi yang diselenggarakan dengan murni dan transparan serta dapat dipercaya akan meningkatkan moral peserta seleksi PNS. Kepercayaan terhadap suatu sistem seleksi yang berkeadilan dapat menghilangkan pemoe bahwa "semua bisa diatur". Peserta seleksi akan percaya bahwa yang menentukan kelulusan mereka adalah semata-mata berdasarkan kemampuan mereka sendiri dan oleh sebab itu mereka harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti suatu kompetisi agar bisa lulus. Semua peserta seleksi dengan status sosial yang beragam memiliki peluang yang sama untuk lulus dalam suatu formasi jabatan yang dilamar. Alangkah bahagiannya kita mendengarkan bahwa seorang anak tukang becak, buruh penderes getah karet atau penjual sayur di pasar tradisional dapat lulus dan diterima menjadi PNS tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi pendidikan yang berkualitas dan hanya dengan belajar sungguh-sungguh saja yang dapat mengantarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan dalam hidup mereka.

Independensi PT

Kemandirian atau independensi PT merupakan salah satu alasan untuk memilihnya menjadi mitra dalam proses seleksi PNS. Seperti kita ketahui bahwa PT pada umumnya merupakan salah satu institusi yang independen dan tidak berpihak. Independensi ini membuat suatu PT dapat bergerak dengan leluasa tanpa kekhawatiran akan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Masyarakat juga menyadari hal ini dan menaruh kepercayaan bahwa PT merupakan benteng terakhir dalam penegakan moral di suatu negara. Para sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa terikat pada aturan-aturan yang dimuat dalam kode etik yang telah disepakati bersama dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Demikian juga halnya dalam proses seleksi PNS, biasanya orang-orang yang terlibat dalam kepanitian yang dibentuk oleh PT memiliki keberanian untuk dengan tegas menolak permintaan untuk mengintervensi kelulusan seseorang tanpa kekhawatiran akan beresiko terhadap posisi atau pekerjaannya. Integritas pimpinan PT sebagai pembina kegiatan menjadi unsur penting dalam upaya untuk menjamin bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, keterlibatan pimpinan PT dalam kepanitian seperti itu merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan.

Transparansi pengolahan data

Pengolahan data hasil ujian biasanya dilakukan secara transparan disaksikan langsung oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dimungkinkan dengan menjadwalkan proses pengolahan data sehingga para pemangku kepentingan dari setiap daerah seperti kepala daerah, perwakilan DPRD, BKN, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektur Daerah, Kepolisian Daerah dapat hadir dan melihat langsung kegiatan dimaksud.

Kegiatan tersebut juga dapat disaksikan oleh pihak lainnya melalui layar monitor yang disediakan. Pengolahan data meliputi kegiatan pemindaian (scanning) LJU dan pemeringkatan hasil ujian yang hanya membutuhkan waktu dua atau tiga jam tergantung pada banyaknya jumlah peserta ujian di masing-masing daerah atau instansi. Dengan menggunakan teknologi *digital mark reader* (DMR), PT menyimpan semua arsip hasil pemindaian dalam bentuk *image* yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk dicocokkan kembali dengan LJU aslinya yang dikembalikan kepada daerah masing-masing, apabila diperlukan di kemudian hari.

Melibatkan PT dalam pelaksanaan pengadaan CPNS merupakan suatu keputusan yang bijaksana dalam upaya kita bersama untuk membangun organisasi yang sehat dan pemerintahan yang berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat. Organisasi yang sehat diyakini akan mengantarkan kita mencapai cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

* Penulis adalah Kepala Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara.